



RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2010 - 2014



JAKARTA, 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2010-2014 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. BNPB telah merespon Undang-undang tersebut dengan telah menyusun Renstra Tahun 2010-2014.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

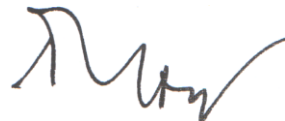
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis BNPB ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi Bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.

Jakarta, Januari 2010

Kepala,



Syamsul Maarif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
1.2.1 Faktor Lingkungan Internal	6
A. Kekuatan	6
B. Kelemahan	7
1.2.2 Faktor Lingkungan Eksternal	7
A. Peluang	7
B. Ancaman	8
1.3 DASAR HUKUM	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014	10
2.1 Visi	10
2.2 Misi	10
2.3 Tujuan	11
2.4 Sasaran	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM	12
3.1 Arah Kebijakan	12
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014	12
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB tahun 2010-2014	12
3.2 Program dan Kegiatan	12
3.2.1 Program Generik	13
3.2.2 Program Teknis	13
BAB IV PENUTUP	16
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja	i
Lampiran 2 : Matriks Pendanaan	xxv
Lampiran 3 : Matriks Target	xli

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari Komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2005, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan nasional yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan.

Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Pada kurun waktu 2005-2009 upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Selain itu, melalui pembentukan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, Indonesia mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional, karena Indonesia telah memperlihatkan adanya komitmen global untuk upaya pengurangan risiko bencana, sebagai bagian dari implementasi Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005 – 2015. Masih dalam kerangka pelaksanaan mandat undang-undang penanggulangan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dengan kerangka waktu yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebagai landasan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya juga merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah: (1). memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; (2). menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; (3). menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4). melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5). menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; (6). mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (7). melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan (8). menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki fungsi: (1). perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (2).

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, BNPB menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BNPB dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja BNPB dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BNPB.

Kedepan BNPB akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui: (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007; (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, BNPB dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana

baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan yang terakhir adalah (6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Hal ini dalam rangka pula pemenuhan peraturan turunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana (PP no. 21 tahun 2008), pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (PP no. 22 tahun 2008), serta pengaturan peran serta lembaga internasional maupun asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana (PP no. 23 tahun 2008). Sehingga harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, tanggal 20 Januari 2010, maka Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 (Renas-PB) dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012

1.2. Potensi dan Permasalahan

Secara nasional, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana**, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
2. **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana diuraikan didalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana uraian berikut:

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan

- 1) Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- 2) Terbentuknya kelembagaan BNPB yang dipimpin oleh setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- 3) Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam Pembangunan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
- 4) Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB di daerah, yang memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana;
- 6) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- 7) Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik; dan
- 8) Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan kontingensi).

B. Kelemahan

- 1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 3) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- 4) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- 1) Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

- 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten/kota); dan
- 4) Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

B. Ancaman

- 1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain BNPB;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit Kementerian/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
- 4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
- 5) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

1.3 Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
 16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
 18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/2008
 19. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014
 20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
 21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014

2.1. Visi

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

2.2. Misi

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dsapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

2.3. Tujuan

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2010 – 2014 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah:

- 1) Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2010-2014, meliputi:

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

1. Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana dan
2. Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

2.4. Sasaran

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2010-2014) adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014

3.1.1 Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana 2010-2014, penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB tahun 2010-2014

Arah kebijakan dan strategi BNPB merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BNPB yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2010-2014) adalah:

1. Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Nasional Penangulangan Bencana sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah:

“Program Penanggulangan Bencana”

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. **Program generik**, yang meliputi antara lain:

- a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. **Program teknis**, Penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2010-2014, berdasarkan unit kerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah:

1. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencakup unit kerja Sekretariat Utama :
 - a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Hukum Dan Kerjasama;
 - c. Biro Keuangan;
 - d. Biro Umum;
 - e. UPT Regional.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencakup unit kerja:
 - a. Biro Umum;
 - b. Pusdiklat.
3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencakup unit kerja Inspektorat Utama :
 - a. Inspektur I;
 - b. Inspektur II.

4. Program penanggulangan bencana nasional, mencakup unit kerja:
 - a. Deputi Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana
 - 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - 3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - b. Deputi Bidang Penanganan Darurat, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
 - 2) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
 - 3) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
 - c. Deputi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - 2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
 - 3) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
 - 4) Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana
 - d. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - e. Pusdatinmas, dengan kegiatan pokok yang meliputi :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan data
 - 2) Kegiatan Pengembangan sistem informasi
 - 3) kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat

Dalam rangka mendukung program pokok tersebut dan untuk menampung kegiatan BNPB yang bersifat rutin, tetap diperlukan beberapa program yang terkait Program Penerapan Pemerintahan yang Baik yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program
 - b. Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
 - c. Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana

- d. Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur
 - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penanggulangan bencana
- 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I
 - b. Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah II Tahun 2010-2014, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Matrik kinerja dan matrik pendanaan sebagai pelengkap Rencana Strategis BNPB tahun 2010-2014, terlampir pada bagian Lampiran penyusunan Renstra ini.

Lampiran:

1. Matrik Kinerja
2. Matrik Pendanaan
3. Matrik Target

L A M P I R A N 1

M A T R I K S K I N E R J

Lampiran 1: Matriks Kinerja

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : SEKRETARIAT UTAMA
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama FUNGSI : • Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan lingkungan BNPB; • Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; • Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi			Outcome : MENINGKATNYA KOORDINASI DAN KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN TERHADAP PROGRAM, ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA SERTA KERJASAMA DI LINGKUNGAN BNPB Indikator : • Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan dan evaluasi program • Terlaksananya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel • Terlaksananya penyusunan peraturan perundangan, telaahan hukum dan kerjasama dalam dan luar negeri • Terlaksananya pembinaan administrasi umum dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur • Terselenggaranya pendidikan dan latihan penanggulangan bencana • Tersedianya data dan informasi kebencanaan	1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNPB 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BNPB

UNIT ESELON 2 : BIRO PERENCANAAN

TIPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB. FUNGSI: • Penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; • Penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB	Output : Terlaksananya pelaksanaan Koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi di lingkungan BNPB sesuai Rencana Kerja Pemerintah Indikator : Tersedianya program dan anggaran bersumber APBN Tersedianya program dan anggaran bersumber Luar Negeri dan anggaran lainnya Tersusunnya evaluasi program	• Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program.

UNIT ESELON 2 : BIRO KEUANGAN

TIPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BNPB. FUNGSI: • Penyiapan bahan koordinasi penggunaan/pengeluaran dan penerimaan anggaran serta pengelolaan anggaran BNPB; • Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, gantirugi dan bahan pembinaan tata usaha keuangan negara BNPB; • Pelaksanaan verifikasi dan akuntans anggaran serta penyusunan laporan keuangan BNPB	Output : Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BNPB sesuai SAP Indikator : Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP) Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan anggaran % masalah perbendaharaan yang ditindaklanjuti	• Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

UNIT ESELON 2 : BIRO HUKUM DAN KERJASAMA

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana FUNGSI: • Penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan masalah hukum di bidang penanggulangan bencana; • Penyiapan bahan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana	Output : Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana Indikator : • Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun • Jumlah telaahan hukum yang dilakukan • Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana	• Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana

UNIT ESELON 2 : BIRO UMUM

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga serta perlengkapan FUNGSI: • Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, arsip dan dokumentasi; • Pelaksanaan urusan kepegawaian; • Pelaksanaan urusan rumah tangga serta perlengkapan;	Output : Terkelolanya urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian dan kegiatan administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana Indikator : • Tertibnya pengelolaan administrasi umum • Tertib dan lancarnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	• Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	SEKRETARIAT UTAMA
TUGAS POKOK	:	Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama
FUNGSI	:	• Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan lingkungan BNPB; • Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; • Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BNPB 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BNPB	Outcome : MENINGKATNYA KOORDINASI DAN KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN TERHADAP PROGRAM, ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA SERTA KERJASAMA DI LINGKUNGAN BNPB Indikator : • Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan dan evaluasi program • Terlaksananya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel • Terlaksananya penyusunan peraturan perundangan, telaahan hukum dan kerjasama dalam dan luar negeri • Terlaksananya pembinaan administrasi umum dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur • Terselenggaranya pendidikan dan latihan penanggulangan bencana • Tersedianya data dan informasi kebencanaan	Output : Terlaksananya pelaksanaan Koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi di lingkungan BNPB sesuai Rencana Kerja Pemerintah Indikator : Tersedianya program dan anggaran bersumber APBN Tersedianya program dan anggaran bersumber Luar Negeri dan anggaran lainnya Tersusunnya evaluasi program	• Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program.	BIRO PERENCANAAN
		Output : Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BNPB sesuai SAP Indikator : Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP) Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan anggaran % masalah perbendaharaan yang ditindaklanjuti	• Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	BIRO KEUANGAN
		Output : Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana	• Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di	BIRO HUKUM DAN KERJASAMA

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indikator : - Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun - Jumlah telaahan hukum yang dilakukan - Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana	bidang penanggulangan bencana	
		Output : Terkelolanya urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian dan kegiatan administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana Indikator : - Tertibnya pengelolaan administrasi umum - Tertib dan lancarnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umumKegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	BIRO UMUM

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : INSPEKTORAT UTAMA
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BNPB FUNGSI : • Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BNPB; • Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk kepala BNPB; • Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama; • Penyusunan laporan hasil pengawasan			Outcome : TERWUJUDNYA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT-UNIT INTERNAL BNPB YANG AKUNTABEL Indikator : • Jumlah kegiatan reviu, pemantauan & evaluasi unit-unit kerja di lingkungan BNPB • Jumlah kegiatan audit unit-unit kerja di lingkungan BNPB • % Tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) pemeriks external • % rekomendasi pemeriksaan (LHP) ditindaklanjuti	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BNPB

UNIT ESELON 2 : INSPEKTORAT I

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas. FUNGSI: • Perumusan rencana dan program kerja pengawasan; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas; • Pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas; • Penyusunan laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat I	Output : Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas. Indikator : • Jumlah kegiatan reviu, pemantauan & evaluasi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas • Jumlah kegiatan audit di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas • % rekomendasi audit unit-unit kerja dalam lingkup wewenang inspektorat I ditindaklanjuti	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UNIT-UNIT KERJA DALAM LINGKUP WEWENANG INSPEKTORAT I

UNIT ESELON 2 : INSPEKTORAT II

TUPOKSI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN
(6)	(7)	(8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama. FUNGSI: • Perumusan rencana dan program kerja pengawasan; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian kinerja di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama; • Pemantauan dan evaluasi seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama; • Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian khusus untuk tujuan tertentu di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama; • Penyusunan laporan hasil pengawasan (LHP) Inspektorat II	Output : Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama. Indikator : • Jumlah kegiatan reviu, pemantauan & evaluasi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama • Jumlah kegiatan audit di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama.; • % rekomendasi audit unit-unit kerja dalam lingkup wewenang inspektorat II ditindaklanjuti	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UNIT-UNIT KERJA DALAM LINGKUP WEWENANG INSPEKTORAT II

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	INSPEKTORAT UTAMA
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BNPB
FUNGSI	:	• Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BNPB; • Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk kepala BNPB; • Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama; • Penyusunan laporan hasil pengawasan

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BNPB	Outcome : TERWUJUDNYA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT-UNIT INTERNAL BNPB YANG AKUNTABEL Indikator : • Jumlah kegiatan pemeriksaan unit-unit kerja di lingkungan BNPB • Jumlah kegiatan audit unit-unit kerja di lingkungan BNPB • % Tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) pemeriksaan external • % rekomendasi audit (LHP) ditindaklanjuti	Output : Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas. Indikator : • Jumlah kegiatan reviu, pemantauan & evaluasi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas • Jumlah kegiatan audit di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas • % rekomendasi audit unit-unit kerja dalam lingkup wewenang inspektorat I ditindaklanjuti	• Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I	INSPEKTORAT I

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Output : Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama. Indikator : • Jumlah kegiatan reviu, pemantauan & evaluasi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama • Jumlah kegiatan audit di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama.; • % rekomendasi audit unit-unit kerja dalam lingkup wewenang inspektorat II ditindaklanjuti	• Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II	INSPEKTORAT II

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 2 : PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi, pengembangan basisdata dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana. FUNGSI : • Penyusunan rencana dan program pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana; • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik; • Penyusunan, pembinaan dan pengembangan basis data penanggulangan bencana; • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi di bidang kebencanaan; • Penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana; • Pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; • Penyiapan hubungan dengan pers dan media, serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana; • Penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang			Output : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DATA, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, SERTA HUBUNGAN MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA SECARA OPTIMAL. Indikator : • Meningkatnya ketersediaan data statistik dan spasial kebencanaan • Meningkatnya ketersediaan sistem informasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah • Meningkatnya pelaksanaan kehumasan di bidang penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana Nasional

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan; • Evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana				

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi, pengembangan basisdata dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana.
FUNGSI	:	• Penyusunan rencana dan program pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana; • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik; • Penyusunan, pembinaan dan pengembangan basis data penanggulangan bencana; • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi di bidang kebencanaan; • Penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana; • Pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi; • Penyiapan hubungan dengan pers dan media, serta pengelolaan dokumentasi penanggulangan bencana; • Penyiapan urusan penerangan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta pengelolaan perpustakaan; • Evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan data, informasi dan humas di bidang penanggulangan bencana

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(4)	(3)	(4)	(5)
	Outcome : MENINGKATNYANYA PENGELOLAAN DATA, PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, SERTA PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA Indikator : • Meningkatnya koordinasi pengelolaan data, informasi dan kehumasan di pusat dan daerah	Output : Terlaksananya pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, serta hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana secara optimal. Indikator : • Meningkatnya ketersediaan data statistik dan spasial kebencanaan • Meningkatnya ketersediaan sistem informasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah • Meningkatnya pelaksanaan kehumasan di bidang penanggulangan bencana	Pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana	Pusat Data, Informasi dan Humas

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan. FUNGSI : • Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang program; • Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan; • Penyusunan perencanaan dan pengembangan panduan fasilitator dan bahan ajar teknis kebencanaan; • Penatausahaan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi peserta pelatihan			Outcome : TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA PROFESIONAL Indikator : • % ketersediaan bahan ajar teknis kebencanaan • % ketersediaan kurikulum tentang kebencanaan • Jumlah peserta pelatihan tersertifikasi sesuai standar	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

UNIT ESELON 1 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

FUNGSI :

- Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang program;
- Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan;
- Penyusunan perencanaan dan pengembangan panduan fasilitator dan bahan ajar teknis kebencanaan; Penatausahaan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi peserta pelatihan

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara (Diklat struktural dan fungsional) • Penyusunan Program Diklat • Penjajagan Kebutuuh Diklat di Daerah • Diklat Teknis Tingkat Manajerial. • Penyusunan/pengembangan kurikulum/bahan ajar • Penyusuan Juklak Diklat • Monitoring dan evaluasi Diklat.	

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat FUNGSI : • Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat			Outcome : MENINGKATNYA UPAYA PENCEGAHAN , MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN DALAM RANGKA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM. Indikator : • Meningkatnya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di pusat dan daerah • Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. • Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di pusat dan daerah • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PENGURANGAN RISIKO BENCANA

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana. FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pencegahan; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang mitigasi; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pengurangan risiko bencana	Output : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di pusat dan daerah. Indikator : • Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di pusat dan daerah. • Terlaksananya koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan PRB di pusat dan daerah. • Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PRB di pusat dan daerah. • Tersusunnya RPB dan Rencana Aksi PRB • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	• Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta lembaga usaha; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peranserta organisasi sosial masyarakat nasional dan internasional; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;	Output : Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Indikator : • Terlaksananya wadah koordinasi relawan penanggulangan bencana Indonesia • Terlaksananya sertifikasi relawan penanggulangan bencana Indonesia • Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	• Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
• Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana		

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang kesiapsiagaan; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang peringatan dini; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perencanaan siaga; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penyiapan sumberdaya; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang kesiapsiagaan	Output : Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di pusat dan daerah. Indikator : • Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi dan kedaruratan • Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana • Terlaksananya penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	• Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TUGAS POKOK	:	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
FUNGSI	:	• Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Outcome : MENINGKATNYA KOORDINASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN MELALUI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBERDAYAAN SERTA KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT Indikator : • Meningkatnya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di pusat dan daerah • Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di pusat dan daerah • Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.	Output : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di pusat dan daerah. Indikator : • Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di pusat dan daerah. • Terlaksananya koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan PRB di pusat dan daerah. • Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PRB di pusat dan daerah. • Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	• Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana	DIREKTORAT PENGURANGAN RISIKO BENCANA
		Output : Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.	• Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indikator : • Terlaksananya wadah koordinasi relawan penanggulangan bencana Indonesia • Terlaksananya sertifikasi relawan penanggulangan bencana Indonesia • Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program		
		Output : Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di pusat dan daerah. Indikator : • Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi dan kedaruratan • Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana • Terlaksananya penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	• Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat FUNGSI : • Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; • Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi			Outcome : TERSELENGGARANYA PENANGANAN DARURAT SECARA CEPAT, TEPAT , TERPADU DAN MENYELURUH Indikator : • Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah • Terlaksanannya koordinasi penyaluran bantuan darurat dipusat dan daerah • Terlaksanannya koordinasi perbaikan prasarana dan sarana vital serta layanan dasar dipusat dan daerah • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT TANGGAP DARURAT

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang perencanaan darurat, pengendalian operasi dan bidang penyelamatan evakuasi korban bencana; • Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pendataan darurat, pengorganisasian posko, pelaksanaan penyelamatan korban bencana; • Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan operasi, kebutuhan sarana dan prasarana posko dan upaya penanganan evakuasi korban; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perencanaan darurat, bidang pengendalian operasi dan bidang penyelamatan evakuasi korban bencana; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang tanggap darurat.	Output : Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di pusat dan daerah Indikator : • Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah • Meningkatnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pencarian penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggap Darurat	Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT BANTUAN DARURAT

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan darurat FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana pelaksanaan kebijakan umum, dan komando pelaksanaan hubungan kerja di bidang bantuan sandang pangan, bantuan hunian sementara, bantuan kesehatan dan air bersih; • Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang bantuan sandang dan pangan serta bantuan hunian sementara; • Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang	Output : Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di pusat dan daerah Indikator : • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan darurat untuk pencarian, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan dasar bagi korban bencana dan perbaikan darurat. • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Darurat • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Darurat	Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
bantuan kesehatan dan air bersih; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang bantuan sandang pangan, pelaksanaan bantuan hunian sementara, bantuan kesehatan dan air bersih		

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PERBAIKAN DARURAT

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat FUNGSI: • Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan dan hubungan kerja di bidang perbaikan darurat, pembersihan lingkungan dan perbaikan dibidang prasarana dan sarana vital; • Penyiapan perencanaan, dan pelaksanaan di bidang pembersihan lingkungan, bidang penyiapan peralatan, pelaksanaan perbaikan kerusakan prasarana dan sarana sosial; • Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang perbaikan sarana vital, bidang angkutan, pelaksanaan perbaikan darurat prasarana dan sarana ekonomi; • Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan pelaporan, fasilitasi pengumpulan dan pembuangan puing dan sampah akibat bencana; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat, bidang pembersihan lingkungan, bidang prasarana dan sarana vital	Output : Terselenggaranya koordinasi bantuan perbaikan prasarana dan sarana vital serta layanan dasar di pusat dan daerah Indikator : • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana vital serta layanan dasar • Terlaksananya koordinasi pembersihan lingkungan • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program penanganan darurat • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program penanganan darurat	Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini prasarana dan sarana vital di daerah terkena bencana

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT
TUGAS POKOK	:	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
FUNGSI	:	• Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi; • Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanggulangan pengungsi; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Outcome : TERSELENGGARANYA PENANGANAN DARURAT SECARA CEPAT, TEPAT, TERPADU DAN MENYELURUH Indikator : • Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah • Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan darurat di pusat dan daerah • Terlaksananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar di pusat dan daerah	Output : Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di pusat dan daerah Indikator : • Meningkatnya koordinasi penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah • Meningkatnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. • Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tanggap darurat.	Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana	DIREKTORAT TANGGAP DARURAT
		Output : Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di pusat dan daerah Indikator : • Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan darurat untuk pencarian, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan perbaikan darurat • Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan santunan duka cita dan santunan kecacatan	Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana	DIREKTORAT BANTUAN DARURAT

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bagi korban bencana. • Terlaksananya koordinasi perlindungan terhadap kelompok rentan • Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan darurat		
		Output : Terselenggaranya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar di pusat dan daerah Indikator : Terlaksananya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar Telaksananya koordinasi pembersihan lingkungan Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan darurat	Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana	DIREKTORAT PERBAIKAN DARURAT

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana FUNGSI : • Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana			Outcome : TERSELENGGARANYA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA PASCA BENCANA SECARA TERKOORDINASI DAN TERPADU Indikator : • Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di pusat dan daerah • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di pusat dan daerah • Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan penanganan pengungsi • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PENILAIAN KERUSAKAN

TUPOKSI	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN
(6)	(7)	(8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan	Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Indikator : • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian	Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penilaian kerusakan; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan estimasi pembiayaan; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan.	• Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya dukungan bagi Tim Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana • Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN FISIK

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan fisik; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas sosial; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik	Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana Indikator : • Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya) • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan non fisik akibat bencana FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan sosial-bencana; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan ekonomi; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan layanan publik, peningkatan kesehatan dan lingkungan; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi	Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana Indikator : • Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya) • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PENANGANAN PENGUNGSI

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi FUNGSI: • Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan umum, dan hubungan kerja di bidang penanganan pengungsi; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang penempatan pengungsi; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengungsi	Output : Terselenggaranya koordinasi pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi. Indikator : • Terlaksananya koordinasi perumusan dan kebijakan penanganan pengungsi • Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
TUGAS POKOK	:	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
FUNGSI	:	• Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Outcome : TERSELENGGARANYA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA PASCA BENCANA SECARA TERKOORDINASI DAN TERPADU Indikator : • Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di pusat dan daerah • Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di pusat dan daerah • Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan penanganan pengungsi	Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Indikator : • Terlaksananya koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian • Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	DIREKTORAT PENILAIAN KERUSAKAN
		Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana Indikator : • Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN FISIK
		Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indikator : Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Terlaksananya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi		
		Output : Terselenggaranya koordinasi pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi. Indikator : Terlaksananya koordinasi perumusan dan kebijakan penanganan pengungsi	Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana	DIREKTORAT PENANGANAN PENGUNGS

LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
 VISI : -
 MISI : -

TUPOKSI	KINERJA K/L (IMPACT)	INDIKATOR KINERJA K/L	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TUGAS POKOK : Melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana FUNGSI : • Perumusan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pelaksanaan penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana			Outcome : Deputi IV TERSELENGGARANYA KETERSEDIAAN DAN PEMENUHAN LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator : • Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan logistik. • Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan peralatan. • Terlaksananya koordinasi pendistribusian logistik dan peralatan. • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT LOGISTIK

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang logistik FUNGSI: • Perumusan kebijakan di bidang logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyimpanan dan distribusi bidang logistik; • Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik	Output : Terlaksananya pengelolaan logistik penanggulangan bencana Indikator : • Ketersediaan logistik kebencanaan • Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan • Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Kegiatan Penyiapan Logistik di Kawasan Rawan Bencana

UNIT ESELON 2 : DIREKTORAT PERALATAN

TUPOKSI (6)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (7)	USULAN KEGIATAN (8)
TUGAS POKOK: Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peralatan FUNGSI: • Perumusan kebijakan di bidang peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang inventarisasi kebutuhan dan pengadaan; • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyimpanan dan distribusi bidang peralatan; • Pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peralatan	Output : Terlaksananya pengelolaan peralatan penanggulangan bencana Indikator : • Ketersediaan peralatan kebencanaan • Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan • Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Kegiatan Penyiapan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT ESELON 1	:	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
FUNGSI	:	• Perumusan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pelaksanaan penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

USULAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Outcome : TERSELENGGARANYA KETERSEDIAAN DAN PEMENUHAN LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator : • Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan logistik. • Terlaksananya koordinasi ketersediaan dan pemenuhan peralatan. • Terlaksananya koordinasi pendistribusian logistik dan peralatan.	Output : Terlaksananya pengelolaan logistik penanggulangan bencana Indikator : • Ketersediaan logistik kebencanaan • Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan • Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	• Kegiatan pengelolaan logistik penanggulangan bencana	DIREKTORAT LOGISTIK
		Output : Terlaksananya pengelolaan peralatan penanggulangan bencana Indikator : • Ketersediaan peralatan kebencanaan • Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan • Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	• Kegiatan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana	DIREKTORAT PERALATAN

Lampiran 2: Matriks Pendanaan
Rekapitulasi Pendanaan 2010-2014

PROGRAM	Unit Kerja Eselon I	ALOKASI PENDANAAN (dalam Milyar)					
		2010	2011	2012	2013	2014	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM TEKNIS	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	448,00	448,53	51,39	59,52	58,97	1.066,40
Penanggulangan Bencana Nasional	Penanganan Darurat	31,27	31,82	33,82	41,32	40,74	178,96
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	15,40	15,69	17,27	21,74	21,43	91,53
	Logistik dan Peralatan	64,80	69,41	75,07	85,70	80,02	375,00
PROGRAM GENERIK							-
Dukungan Manajemen Dan Pelaksana Teknis Lainnya	Pusdiklat	5,50	5,60	6,17	7,76	7,51	32,54
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB	Pusdantimas	13,50	13,76	15,14	19,06	18,79	80,23
	Sekretariat Utama	67,45	75,04	79,02	85,51	87,90	394,92
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB	Inspektorat Utama	3,30	3,36	3,70	4,66	4,50	19,52
total		649,22	663,21	281,56	325,26	319,85	2.239,10

Sekretaris Utama

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya.	Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program.	7,50	7,86	8,65	8,89	10,53
	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	1,25	1,51	1,66	2,09	2,03
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB	Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana	1,50	1,81	2,00	2,51	2,43
	Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umumKegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	57,20	63,85	66,71	72,01	72,91
total		67,45	75,04	79,02	85,51	87,90

Inspektorat Utama

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UNIT-UNIT KERJA DALAM LINGKUP WEWENANG INSPEKTORAT I	1,65	1,93	1,85	2,33	2,25
	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UNIT-UNIT KERJA DALAM LINGKUP WEWENANG INSPEKTORAT II	1,65	1,43	1,85	2,33	2,25
total		3,30	3,36	3,70	4,66	4,50

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	pencegahan dan pengurangan risiko bencana	12,5 (¹) [*]	12,73 (¹) [*]	14,01	17,64	17,40
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	5,80	5,91	6,50	8,19	8,07
	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	29,70 (400) ^{**}	29,88 (400) ^{**}	30,87	33,69	33,50
total		448,00	448,53	51,39	59,52	58,97

^{*}PHLN di pencegahan dan pengurangan risiko bencana

^{**}400M akan dimanfaatkan melalui Deputi Logistik dan Peralatan

Deputi Bidang Penanganan Darurat

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana	9,00	9,31	9,18	12,50	10,72
	Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana	20,20	20,30	22,20	25,75	27,00
	Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana	2,07	2,21	2,44	3,07	3,02
total		31,27	31,82	33,82	41,32	40,74

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	7,75	7,90	8,69	10,94	10,79
	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	2,25	2,29	2,52	3,18	3,13
	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	3,23	3,29	3,62	4,56	4,50
	Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana	2,17	2,21	2,43	3,06	3,02
total		15,40	15,69	17,27	21,74	21,43

Ditambah*: PHLN dibawah penilaian kerusakan terkait IMDF dan PHLN untuk pasca gempa+komitmen PHLN khusus Sumbar (IDB)

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENANGGULANGAN BENCANA	Kegiatan Pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24,80	25,46	29,01	35,12	30,43
	Kegiatan Pengelolaan Peralatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	40,00	43,95	46,06	50,58	49,59
total		64,80	69,41	75,07	85,70	80,02

*penambahan 400M dari Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pusat Data dan Informasi dan Humas

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penanggulangan bencana	Pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana	13,50	13,76	15,14	19,06	18,79
total		13,50	13,76	15,14	19,06	18,79

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam milyar)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	Diklat Teknik Penanggulangan Bencana tingkat Manajer	2,50	2,55	2,80	3,53	3,41
	Diklat Teknis Lapangan Penanggulangan Bencana	2,00	2,04	2,24	2,82	2,73
	Diklat Operasional Penanggulangan Bencana	1,00	1,02	1,12	1,41	1,36
total		5,50	5,60	6,17	7,76	7,51

Lampiran 3: Matriks Target

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : SEKRETARIAT UTAMA
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya. - Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB	Meningkatkan Koordinasi Dan Keterpaduan Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian Terhadap Program, Administrasi Dan Sarana Prasarana Serta Kerjasama Di Lingkungan BNPB	Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi program.	Terlaksananya pelaksanaan Koordinasi penyusunan program dan anggaran, Monev di lingkungan BNPB sesuai Rencana Kerja Pemerintah	- Tersedianya program dan anggaran bersumber APBN - Tersedianya program dan anggaran bersumber Luar Negeri dan anggaran lainnya - Tersusunnya evaluasi program	8	8	8	8	8	Biro Perencanaan
		Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BNPB sesuai SAP	- Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP) - Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan anggaran % masalah perbendaharaan yang ditindaklanjuti	6	6	6	6	6	Biro Keuangan

		• Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana	Pengelolaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana	• Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun • Pembinaan antar lembaga • Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana	15	15	15	15	15	Biro Hukum Dan Kerjasama
		• Kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umumKegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	Terkelolanya urusan tata usaha, pengelolaan kepegawaian dan kegiatan administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana.	• Tertibnya pengelolaan administrasi umum • Tertib dan lancarnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	20	20	20	20	20	Biro Umum

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : INSPEKTORAT UTAMA
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
• PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BNPB	TERWUJUDNYA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT-UNIT INTERNAL BNPB YANG AKUNTABEL	• Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat I	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas.	- Jumlah kegiatan review, pemantauan dan evaluasi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas - Jumlah kegiatan audit di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data dan Informasi dan Humas % rekomendasi audit unit-unit kerja dalam lingkup wewenang inspektorat I ditindaklanjuti	3	4	4	4	4	INSPEKTORAT I

		Kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dalam lingkup wewenang inspektorat II	Tersusunnya laporan keuangan di lingkungan BNPB sesuai SAP	- Jumlah kegiatan pemeriksaan di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama - Jumlah kegiatan audit di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dan Sekretariat Utama % rekomendasi audit unit-unit kerja dalam lingkup wewenang inspektorat II ditindaklanjuti	3	4	4	4	4	INSPEKTORAT II

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
• Penanggula ngan Bencana Nasional	Meningkatnya Koordinasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Melalui Pengurangan Risiko Bencana Dan Pemberdayaan Serta Kesiapsiagaan Masyarakat	• Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di pusat dan daerah.	• Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di pusat dan daerah. • Terlaksananya koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan PRB di pusat dan daerah. • Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PRB di pusat dan daerah. • Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program • Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	8/5	9/7	9/9	10/9	12/10	Direktorat Pengurangan Risiko Bencana

		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.	- Terlaksananya koordinasi pemanfaatan dan penerapan sistem peringatan dini. - Terlaksananya wadah koordinasi relawan PBI - Terlaksananya sertifikasi relawan PBI - Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program - Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana - Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparatur dan pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah	12/14	14/10	14/16	15/16	16/16	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
		Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	- Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi - Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB) - Terlaksananya penyelenggaraan gladi dan simulasi penanggulangan bencana	12/16	14/14	15/14	16/18	18/20	Direktorat Kesiapsiagaan

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
• Penanggulangan Bencana Nasional	Terselenggaranya Penanganan Darurat Secara Cepat, Tepat, Terpadu Dan Menyeluruh	Kegiatan Tanggap Darurat Di Daerah Terkena Bencana	Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Darurat Secara Terpadu Di Pusat Dan Daerah	- Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah - Terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan dipusat dan daerah - Terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan perbaikan sarana vital dan layanan dasar dipusat dan daerah	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Direktorat Tanggap Darurat
		Kegiatan Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Di Daerah Terkena Bencana	Terselenggaranya Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kedaruratan Dipusat Dan Daerah	- Terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi. - Terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat		Direktorat Bantuan Darurat
		Kegiatan Perbaikan Darurat Bencana Dalam Rangka Pemulihan Dini Sarana Dan Prasarana Vital Di Daerah Terkena Bencana	Terlaksanannya Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan perbaikan sarana vital dan layanan dasar	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Saat tanggap darurat	Direktorat Perbaikan Darurat

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
• Penanggula ngan Bencana Nasional	Terselenggara nya Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi Dan Terpadu	Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	• Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksanaan dukungan bagi Tim Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana • Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana	28 provinsi 55 kab/kot	28 provinsi 60 kab/kot	28 provinsi 65 kab/kot	28 provinsi 70 kab/kot	28 provinsi 75 kab/kot	Direktorat Penilaian Kerusakan
		Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik Di Wilayah Pasca Bencana	• Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	28 provinsi 55 kab/kot	28 provinsi 60 kab/kot	28 provinsi 65 kab/kot	28 provinsi 70 kab/kot	28 provinsi 75 kab/kot	Direktorat Pemulihan Dan Peningkatan Fisik

		Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi Di Wilayah Pasca Bencana	• Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi • Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)	28 provinsi 55 kab/kot	28 provinsi 60 kab/kot	28 provinsi 65 kab/kot	28 provinsi 70 kab/kot	28 provinsi 75 kab/kot	Direktorat Pemulihan Dan Peningkatan Sosial Ekonomi
		Kegiatan Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	Terselenggaranya Koordinasi Pemulihan Pasca Bencana Melalui Penanganan Pengungsi.	• Terlaksananya koordinasi perumusan dan kebijakan penanganan pengungsi • Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu	28 provinsi 55 kab/kot	28 provinsi 60 kab/kot	28 provinsi 65 kab/kot	28 provinsi 70 kab/kot	28 provinsi 75 kab/kot	Direktorat Penanganan Pengungsi

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
• PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	TERSELENGKARANYA KETERSEDIAAN DAN PEMENUHAN LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kegiatan Penyiapan Logistik di Kawasan Rawan Bencana	Tersedianya logistik penanggulangan bencana	- Ketersediaan logistik kebencanaan - Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan - Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	26 Prov	28 Prov	30 Prov	33 Prov	33 Prov	DIREKTORAT LOGISTIK
		Kegiatan Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	- Ketersediaan peralatan kebencanaan - Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan - Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana	26 Prov/ 30 Kab/Kot	28 Prov/ 55 Kab/Kot	30 Prov/ 100 Kab/Kot	33 Prov/ 177 Kab/Kot	33 Prov/ 200 Kab/Kot	DIREKTORAT PERALATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUMAS
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penanggulangan bencana	Meningkatnya Pengelolaan Data, pengembangan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di Bidang Penanggulangan Bencana	Pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana	Terlaksananya pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, serta hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana secara optimal	- Meningkatnya ketersediaan data statistik dan spasial kebencanaan - Meningkatnya ketersediaan sistem informasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah - Meningkatnya pelaksanaan kehumasan di bidang penanggulangan bencana	4	5	7	9	8	Pusat Data, Informasi Dan Humas

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT ESELON 1 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
 VISI : -
 MISI : -

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					Unit
					2010	2011	2012	2013	2014	Organisasi Pelaksana
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Secara Profesional	• Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara (Diklat struktural dan fungsional) • Penyusunan Program Diklat • Penjajagan Kebutuhan Diklat di Daerah • Diklat Teknis Tingkat Manajerial. • Penyusunan/ pengembangan kurikulum/bahan ajar • Penyusunan Juklak Diklat • Monitoring dan evaluasi Diklat.	Tersedianya tenaga terdidik dan terlatih dalam penanggulangan bencana	• % ketersediaan bahan ajar teknis kebencanaan • % ketersediaan kurikulum tentang kebencanaan • Jumlah peserta pelatihan tersertifikasi sesuai standar.	6	8	10	12	12	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana